

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaiannya. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi, Pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang di telah dibuat. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali.

Zaman yang sekarang serba global, peranan pemerintah pada setiap bangsa dan negara melakukan pembangunan ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, bahkan pada waktu yang diharapkan akan menjadi negara yang maju. Begitu besarnya masalah negara berkembang, Pembangunan bukan hanya sekedar tugas dan peran pemerintah sebagai aparatur negara, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen lapisan masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Dalam upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan sebagai sektor perekonomian hingga jumlah keluarga miskin dapat berkurang, di butuhkan pengawasan dan pengaturan oleh negara atau pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang, karena keseimbangan

membutuhkan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan komoditas. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana atau langkah-langkah dalam upaya mengurangi jumlah keluarga miskin akibat ketidak seimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara sedang berkembang.

Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Implementasi Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2012 disajikan untuk setiap sasaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2012. Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan difokuskan pada berbagai bidang yang dianggap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang peningkatan infrastruktur, dan bidang lainnya yang dilakukan secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Dalam pasal 215 UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan: Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kecamatan/ kota dan atau pihak ketiga mengikuti sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menaggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Bukit Melintang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012, Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut, melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin yaitu:

1. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standar badan statistika (BPS) perwilayah provinsi dan kabupaten/ kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/ raskin/ santunan sosial).

3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.
7. Tinggal di rumah tidak layak huni.
8. Kesulitan memperoleh air bersih.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus di penuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila penduduk pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, transportasi, dan aneka barang/ jasa lainnya, maka dikategorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari dikategorikan fakir miskin.

BPS dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ /kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas bung air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/ tidak tamat sekolah dasar (SD)/ hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Miskin Di Desa Bukit Melintang Kec. Kuok Kab. Kampar Tahun 2010-2013

NO	TAHUN	JUMLAH KELUARGA MISKIN
1	2010	59 KELUARGA
2	2011	59 KELUARGA
3	2012	55 KELUARGA
4	2013	55 KELUARGA

Sumber Data: Kantor Desa Bukit Melintang, 2014.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata pada tahun 2010 jumlah keluarga miskin di desa bukit melintang sebanyak 59 keluarga, pada tahun 2011 jumlah keluarga miskin sebanyak 59 keluarga, pada tahun 2012 jumlah keluarga miskin di desa bukit melintang sebanyak 55 keluarga, pada tahun 2013 jumlah keluarga miskin di desa bukit melintang sebanyak 55 keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keluarga miskin di desa bukit melintang dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berkurang dimana jumlah keluarga miskin yang awalnya pada tahun 2010 sebanyak 59 keluarga kini pada tahun 2013 sebanyak 55 keluarga.

Tabel 1.2 Jenis Mata Pencaharian Warga di Desa Bukit Melintang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Bertani	198 Orang
2	Wiraswasta	28 Orang
3	Dagang	2 Orang
4	Guru	2 Orang
5	Supir	2 Orang
6	Nelayan	3 Orang
Jumlah		235 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Bukit Melintang, 2014.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya penduduk Desa Bukit Melintang lebih banyak bermata pencaharian bertani yaitu sebanyak 198 orang. Kemudian penduduk Desa Bukit Melintang yang bermata pencaharian wiraswasta 28 orang, yang bermata pencaharian guru sebanyak 2 orang, yang bermata pencaharian sebagai supir 2 orang, yang bermata pencaharian sebagai nelayan 3 orang.

Untuk penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar pemerintah daerah kabupaten kampar mengeluarkan peraturan no 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar , Berdasarkan Peda Kab. Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15, Program penanganan fakir miskin meliputi: (a) Bantuan Pangan, (b) Bantuan Kesehatan, (c) Bantuan Pendidikan, (d) Bantuan Perumahan, (e) Bantuan Peningkatan Keterampilan, dan (f) Bantuan Modal Sosial.

Tugas atau Peran Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan
2. Bantuan Perumahan
3. Bantuan Pendidikan
4. Bantuan Modal Sosial

Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Desa Bukit Melintang telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di Desa Bukit Melintang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi PERDA Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”**.

1.2 Perumusan Masalah

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran peningkatan kemampuan diri untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Bukit Melintang yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sebagai proses dari pembangunan di Desa Bukit Melintang.

Pemerintah Desa Melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul dengan berbagai usaha dan upaya seperti melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitas sosial terhadap penyandang masalah kemiskinan, Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, Memperluas Ketahanan Sosial Masyarakat, Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Masyarakat.

Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemeritah yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalanya adalah **Bagaimana Implementasi PERDA Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PERDA Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Bukit Melintang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis akan mendapat gambaran yang jelas mengenai implementasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih luas tentang topik ini.

- c. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menyusun program-program dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kampar.

1.5 Sistemetika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini di bahas mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistemtika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang berbagai data, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yangdipergunakan, metode dalam melakukan pengumpulan data serta metode analisa dalam membuat data yang diperoleh.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis kantor Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok, gambaran umum wilayah, struktur organisasi, dan aktivitas kecamatan.

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran - saran yang perlu dikemukakan.